



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDI SUFARDIMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **490786**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 2.450.000.000**

1. Tanah Seluas 3000 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN  
Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 416 m2/375 m2 di KAB / KOTA  
BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA GOWA,  
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 22884 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN  
Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, WARISAN  
Rp. 100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 592 m2/80 m2 di KAB / KOTA  
BULUKUMBA, WARISAN Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 267.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SMASH MOTOR BEBEK Tahun 2006, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.  
200.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.  
42.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 10.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	103.059.496
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.000.000
Sub Total	Rp.	2.835.059.496
III. HUTANG	Rp.	485.761.796
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.349.297.700

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.